
Konservasi Mangrove Sebagai Sarana Diplomasi publik Indonesia di World Water Forum 2024

Krisman Heriamsal

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada
krismanheriamsal@mail.ugm.ac.id

Asma Amin

Universitas Sulawesi Barat
asmaamin@unsulbar.ac.id

Diserahkan: 4 Oktober 2024; Direvisi: 6 November 2024; Diterima: 29 November 2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi tujuan bersama dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global dengan menggambarkan pencapaian konservasi mangrove di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Dengan menggunakan konsep diplomasi publik dan soft power, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menunjukkan konservasi mangrove pada delegasi World Water Forum 2024 adalah bentuk diplomasi publik yang bertujuan mengartikulasikan kebijakan Indonesia yang selaras dengan inisiatif global dalam meminimalkan tantangan perubahan iklim. Dalam konteks ini, Indonesia ingin menunjukkan perannya sebagai negara yang berkomitmen melestarikan kawasan mangrove yang diakui sebagai elemen penting dalam memerangi perubahan iklim. Di samping itu ada upaya Indonesia untuk menepis persepsi-persepsi negatif komunitas internasional terhadap Indonesia yang selama ini dianggap turut berkontribusi pada penyebab perubahan iklim. Indonesia juga bercita-cita untuk melibatkan komunitas internasional dalam komitmen bersama untuk melakukan tindakan substantif dalam perjuangan yang sedang berlangsung melawan perubahan iklim.

Kata Kunci: Diplomasi publik, Indonesia, Konservasi mangrove, World Water Forum.

PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis diplomasi publik Indonesia pada perhelatan *World Water Forum* (WWF) ke-10. Diplomasi publik yang dimaksud secara khusus merujuk pada inisiatif yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memperlihatkan konservasi mangrove di Taman Hutan Nasional (Tahura) Ngurah Rai kepada delegasi WWF (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Topik ini menarik dan penting untuk dikaji karena beberapa pertimbangan. Pertama, terdapat pola dan inisiatif yang konsisten yang dilaksanakan oleh Presiden Indonesia di sejumlah forum internasional. Misalnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022, Joko Widodo mengajak para pemimpin G20 untuk menyaksikan secara langsung kegiatan konservasi mangrove di Tahura Ngurah Rai, Bali, dan langkah yang serupa kembali digunakan pada perhelatan WWF di Indonesia. Inisiatif berulang ini menunjukkan bahwa ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat internasional. Kedua, topik ini membantu memahami kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk mengungkap bagaimana Indonesia membangun citra dan pengaruhnya di tingkat global. Ketiga, diplomasi publik yang menggunakan konservasi mangrove

sebagai sarana menandai adanya suatu pendekatan yang berbeda dengan yang umumnya dilakukan oleh negara-negara dalam membangun citra internasionalnya, termasuk Indonesia sendiri yang baru dalam beberapa dekade terakhir menggunakan pendekatan ini.

Tahun 2024 Indonesia mendapat kepercayaan global sebagai tuan rumah kegiatan *World Water Forum* (WWF) ke-10, yang diadakan di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. WWF merupakan agenda air terbesar di dunia, diselenggarakan setiap tiga tahun di bawah naungan *World Water Council* sejak tahun 1997 (Salman, 2003). WWF melibatkan serangkaian konferensi internasional sebagai platform bagi para pemangku kepentingan terkait air maupun para pengambil kebijakan untuk terlibat bersama dalam menangani isu-isu terkait air global, khususnya mengadvokasi hak asasi manusia atas air. *Output* dari WWF biasanya berupa resolusi dan rencana aksi dalam menghadapi tantangan terkait air (Varady, Meehan and McGovern, 2009). WWF ke-10 di Bali dihadiri kurang lebih 64 ribu peserta dari 160 negara, yang terlibat dalam 278 sesi diskusi (World Water Forum Secretariat, 2024). Indonesia berhasil menyusun sejumlah inisiatif terkait air yang kemudian akan menjadi pijakan bagi banyak negara. Selain itu, WWF juga merumuskan Deklarasi Menteri yang mencakup aspek-aspek

penting seperti pembentukan pusat keunggulan untuk ketahanan air dan iklim, pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau kecil, dan proposal untuk memperingati Hari Danau Sedunia (Saputra, 2024).

Setelah kegiatan konferensi, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak para delegasi WWF ke-10 untuk mengunjungi Taman Hutan Ngurah Rai (Tahura) Bali, yang merupakan area khusus untuk Konservasi mangrove. Presiden Joko Widodo menjelaskan pentingnya zona konservasi ini sebagai tempat perlindungan bagi keanekaragaman hayati sekaligus menjadi pusat pendidikan ekowisata. Dalam momentum tersebut, presiden Indonesia menunjukkan wilayah penanaman Mangrove di sepanjang muara yang dilengkapi dengan teknologi listrik bertenaga surya sebagai sumber daya pembangkit listrik di berbagai area konservasi mangrove (Antara News, 2024). Joko Widodo juga menunjukkan fasilitas pembibitan mangrove, yang telah dikembangkan menggunakan kemajuan teknologi modern, termasuk inovasi dalam sistem pengelolaan air yang memungkinkan bibit tanaman berkembang secara independen. Fasilitas ini diakui sebagai satu-satunya pembibitan mangrove modern di Indonesia. Joko Widodo juga secara simbolis menyerahkan bibit mangrove kepada anak-anak, sehingga

mendorong keterlibatan mereka dalam konservasi lingkungan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji inisiatif Joko Widodo tersebut, mengeksplorasi pesan-pesan mendasar yang ingin disampaikan Indonesia, dan menganalisis mengapa pemerintah menggunakan konservasi mangrove sebagai mekanisme dalam diplomasi publiknya.

Sejumlah akademisi telah mengkaji tentang diplomasi Indonesia pada perhelatan WWF di Bali 2024, salah satunya adalah Ayu Puspitasari dan koleganya dalam penelitian yang berjudul *Diplomasi Budaya Indonesia Dalam Memperkenalkan Subak dan Jalur Rempah Di Forum Air Dunia 2024*. Dalam penelitiannya, Puspitasari dkk mengkaji bagaimana Indonesia menampilkan warisan budayanya, khususnya sistem irigasi subak dan rute rempah-rempah bersejarah, selama WWF ke-10. Mereka berargumen bahwa WWF berfungsi sebagai platform bagi Indonesia untuk mempresentasikan identitas dan nilai-nilai budayanya kepada khalayak global. Hasil penelitian Puspitasari dkk menunjukkan bahwa norma dan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dimanfaatkan sebagai *soft power* oleh pemerintah Indonesia. Menurut mereka, strategi ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan

internasional dan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia yang kaya (Puspitasari, Rangga and Wicaksono, 2024).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maria Veni Cista Wau dan koleganya, yang berjudul *Bali Street Carnival dan Melasti Water Carnival Sebagai Bentuk Diplomasi Budaya Indonesia Dalam the 10th World Water Forum*. Mereka secara khusus meneliti peran Karnaval Jalan Bali dan Karnaval Air Melasti sebagai instrumen diplomasi budaya. Menurut Wau dkk, peristiwa ini adalah sarana untuk mempromosikan budaya Indonesia di panggung internasional. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kedua karnaval berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pariwisata dan meningkatkan pengakuan warisan budaya Indonesia. Mereka mencontohkan bagaimana budaya dapat bertindak sebagai bentuk *soft power* untuk menarik perhatian internasional. Mereka berargumen bahwa diplomasi budaya dan *soft power* sangat penting untuk melestarikan warisan budaya dan meningkatkan status global Indonesia (Wau, Luerdi and Nugrahayuningtyas, 2024).

Dari beberapa literatur yang ada, mereka sepakat dan mengakui bahwa budaya memiliki fungsi penting sebagai mekanisme diplomasi Indonesia pada acara *World Water Forum 2024* yang diadakan di

Bali. Namun demikian, masih terdapat elemen-elemen atau sarana diplomasi lain yang digunakan Indonesia pada acara WWF, dan artikel-artikel ilmiah tersebut tidak menjelaskan secara komprehensif sarana yang penulis maksud, dalam hal ini konservasi mangrove. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menyajikan perspektif baru mengenai pendekatan diplomatik alternatif yang digunakan oleh Indonesia, khususnya berfokus pada diplomasi publik yang memanfaatkan konservasi mangrove sebagai saluran untuk mengartikulasikan kebijakan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global kepada publik internasional dalam perhelatan WWF di Bali.

KERANGKA KONSEPTUAL

Diplomasi Publik

Diplomasi publik dapat dicirikan sebagai upaya strategis untuk mendapatkan dukungan publik internasional untuk pemerintah suatu negara, maupun inisiatif kebijakan luar negerinya yang terkait. Praktik ini mencakup interaksi dengan warga negara asing untuk membentuk pandangan dan sentimen mereka mengenai suatu negara dan kerangka kebijakannya (Snow, 2004). Menurut Josep Nye, Diplomasi publik meliputi seni komunikasi, penyebaran ide dan informasi yang strategis untuk

mempengaruhi persepsi, menumbuhkan kepercayaan, dan menambah *soft power*. Tujuan utama Diplomasi publik adalah untuk mempengaruhi sentimen publik dan membangun lingkungan yang kondusif yang mendukung kebijakan pemerintah. Sasarannya adalah entitas non-negara, termasuk individu, media massa, organisasi non-pemerintah, dan aktor terkait lainnya (Nye, 2008).

Penstudi hubungan internasional lainnya menyebutkan bahwa Diplomasi publik didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi pendapat publik atau elit negara lain, yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan keuntungannya. Dalam konteks ini Diplomasi publik dicirikan sebagai proses komunikasi dengan publik asing, yang bermaksud untuk menumbuhkan pemahaman tentang gagasan, cita-cita, institusi, budaya, dan kebijakan suatu bangsa saat ini (Mor, 2007). Hal ini sejalan dengan pendapat Jan Melissen yang mengartikulasikan Diplomasi publik sebagai upaya komunikatif yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan melibatkan masyarakat internasional untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai bangsanya, yang kemudian akan menciptakan opini publik yang memungkinkan para pemimpin

negara sasaran mengambil keputusan yang mendukung tujuan kebijakan luar negeri negara yang melakukan Diplomasi publik (Melissen, 2005).

Diplomasi publik berasumsi bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk mempengaruhi opini publik asing. Artinya, strategi komunikasi sangat penting untuk kesuksesan Diplomasi publik. Selanjutnya diasumsikan bahwa Diplomasi publik bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian antarnegara. Ini melibatkan tidak hanya mempromosikan citra negara tetapi juga memahami perspektif dan budaya negara lain, yang sangat penting untuk membangun hubungan. Diplomasi publik juga beroperasi dengan asumsi bahwa terlibat langsung dengan audiens asing dapat mengarah pada persepsi dan hubungan yang lebih menguntungkan. Asumsi lainnya mengatakan bahwa Diplomasi publik bukan hanya tentang keuntungan jangka pendek tetapi berfokus pada membangun hubungan jangka panjang (Melissen, 2005).

Sementara itu, menurut Joseph S. Nye, beberapa asumsi dasar Diplomasi publik meliputi: Pertama, dalam Diplomasi publik diakui perlunya memiliki citra nasional yang menarik dan kredibel untuk mempengaruhi persepsi publik. Kedua, *soft power* suatu bangsa, yang mencakup

budaya, nilai-nilai etika, dan kebijakannya, memiliki kapasitas untuk secara signifikan mempengaruhi persepsi publik internasional, karena *soft power* berperan penting dalam membentuk sudut pandang, membina hubungan positif, dan mencapai hasil yang diinginkan melalui sarana daya tarik dan persuasi, bukan melalui tindakan koersif. Ketiga, komunikasi yang sukses ditandai dengan sifat timbal baliknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami audiens target dalam Diplomasi publik. Keempat, kemampuan suatu negara untuk berkomunikasi secara efektif dengan komunitas global sangat penting dalam membentuk persepsi, menyebarkan pesan, dan menumbuhkan kepercayaan. Terakhir, Diplomasi publik mengakui pengaruh signifikan entitas non-negara, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM), badan perusahaan, dan lembaga media, dalam proses membentuk persepsi publik (Nye, 2008).

Soft Power

Soft power adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Nye salah satunya melalui bukunya yang berjudul *Bound to lead: the changing nature of American power* pada tahun 1990. Nye menekankan bahwa untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara tidak selalu menggunakan pendekatan tradisional

yang umumnya adalah kekuatan militer dan ekonomi tetapi dengan apa yang ia sebut sebagai *soft power*. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui daya tarik atau kekuatan nontradisional dan bukan melalui paksaan. Menurut Nye, *soft power* dapat memungkinkan suatu negara menunjukkan keunggulannya, yang pada akhirnya akan membuat negara lain menerima dan tertarik untuk mengikuti negara yang tersebut secara sukarela. Adapun sumber-sumber *soft power* suatu negara dapat berasal dari citra positif, ide, nilai-nilai, budaya, norma, dan sebagainya, yang nantinya dapat menghasilkan opini publik yang lebih positif bagi negara yang memiliki *soft power* tersebut (Nye, 1990a).

Definisi *soft power* kembali ditekankan oleh Nye dalam bukunya yang berjudul *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Nye menjelaskan bahwa *soft power* adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain untuk tertarik melakukan apa yang diinginkan oleh negara tersebut tanpa melalui paksaan (Nye, 2005). Dalam konteks ini, ketika suatu negara dapat mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan kekuatan fisik melainkan melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, ide, dan norma, yang membuat negara lain secara sukarela menginginkan hal yang

sama, maka hal itu dapat dikatakan sebagai *soft power* karena negara tersebut berhasil meyakinkan negara lain untuk mengikuti kehendaknya tanpa paksaan langsung.

Ada beberapa asumsi dasar *soft power*. Pertama, suatu negara dapat mempengaruhi negara atau pihak lain bukan melalui paksaan atau kekuatan, tetapi dengan menarik mereka pada cita-cita dan nilai-nilainya. Daya tarik ini dapat berasal dari daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang beresonansi positif dengan negara lain (Nye, 1990b). Dalam konteks ini, negara yang memiliki *soft power* kuat dapat menarik perhatian dan dukungan negara lain karena nilai-nilai politik, budaya, atau kebijakan luar negerinya dianggap positif atau inspiratif. Artinya, negara tersebut mampu mempengaruhi pihak lain melalui ketertarikan dan penghargaan, bukan melalui ancaman atau kekuatan fisik.

Asumsi kedua bahwa *soft power* beroperasi melalui cara-cara non-militer, menekankan pada diplomasi, pertukaran budaya, dan kesuksesan ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi. Artinya, negara dapat mencapai tujuan mereka lebih efektif melalui persuasi daripada melalui ancaman. Asumsi ini menunjukkan bahwa *soft power* beroperasi melalui cara-cara yang lebih halus seperti diplomasi, yang bertumpu pada

daya tarik dan persuasi. Hal ini akan membuat negara lain lebih cenderung bekerja sama karena mereka mengagumi atau terinspirasi oleh negara yang mempraktikkan *soft power* (Nye, 1990a). *Soft power* memungkinkan negara untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang lebih damai dan berkelanjutan. Ketika sebuah negara berhasil membangun citra positif melalui budaya, nilai-nilai, atau keberhasilan ekonomi, negara lain lebih mungkin untuk mendukung kepentingannya secara sukarela. Selain itu, negara yang berhasil menggunakan *soft power* dapat memperluas pengaruhnya secara global tanpa harus menggunakan sumber daya militer yang mahal atau merusak hubungan internasional. Hal itulah mengapa menurut Joseph Nye, *soft power* merupakan elemen penting dalam konteks politik kontemporer untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih cerdas (Nye, 2005).

Asumsi ketiga dari *soft power* menyatakan bahwa suatu negara bisa menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pihak lain melalui promosi nilai-nilai bersama. Dalam konteks hubungan internasional, jika suatu negara mampu mengkomunikasikan dan mewujudkan nilai-nilai tersebut secara efektif, hal ini dapat membangun citra positif di mata negara lain. Akibatnya, negara-negara lain akan

mengagumi dan mungkin terinspirasi oleh pendekatan tersebut, yang berpotensi memperkuat hubungan internasional serta meningkatkan kerjasama global (Yigit, 2024). Keempat, *soft power* sangat bergantung pada bagaimana sebuah negara dipersepsikan oleh negara lain. Premisnya adalah bahwa citra dan reputasi yang baik dapat secara signifikan memperkuat kemampuan negara tersebut dalam mempengaruhi pihak lain. Persepsi ini bisa terbentuk melalui kebijakan luar negeri yang berhasil dan penyebaran nilai-nilai yang mendapat respons positif secara global (Nye, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis dengan memaparkan data dan mengelaborasi praktik Diplomasi publik Indonesia pada perhelatan *World Water Forum* 2024 di Bali. Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada analisis data dan bukti-bukti yang tidak memerlukan model-model statistik, melainkan analisis yang sifatnya interpretatif.

Penulis mengombinasikan jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi literatur dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh institusi resmi atau negara, jurnal ilmiah, buku, media berita dan artikel, serta *website* resmi dari organisasi-

organisasi dan negara. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui pidato atau pernyataan-pernyataan pemerintah Indonesia maupun komunitas internasional lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang sifatnya interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Global Terhadap Indonesia Mengenai Isu Lingkungan

Indonesia sering dianggap oleh komunitas internasional sebagai negara yang memainkan peran penting dalam upaya global menghadapi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki sejumlah sumber daya potensial yang dapat berkontribusi pada penanggulangan perubahan iklim. Sebagai negara dengan luas hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia dengan luas yang mencapai 125,76 hektar atau setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia, membuat Indonesia sering diakui sebagai paru-paru dunia (satria, 2023). Hutan hujan tropis sendiri memiliki peran yang sangat signifikan pada siklus karbon global. Hutan dapat menyerap karbon dari atmosfer dalam pertumbuhannya, yang kemudian akan meminimalkan penyebab perubahan iklim (Dewi, 2024). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

menyebutkan bahwa hutan hujan tropis Indonesia dapat menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton (Annur, 2022).

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan luas ekosistem Mangrove terbesar di dunia. Indonesia mempunyai luas Mangrove sebesar 3.489.140,68 hektar, setara dengan 23% ekosistem Mangrove dunia yaitu dari total luas 16.530.000 hektar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Keberadaan Mangrove dapat membantu mitigasi perubahan iklim karena sifatnya yang dapat menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar dari lautan, laut, dan udara. Hutan Mangrove di Indonesia mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan Mangrove di Indonesia (Annur, 2022). Mangrove juga dapat menyehatkan terumbu karang yang ada di sekitarnya, dimana terumbu karang memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida, bahkan, organisme ini diklaim mampu menyerap karbon tiga kali lebih baik dibandingkan dengan pepohonan (Fitria and Dwiyanto, 2021). Selain itu, Mangrove dapat meningkatkan kemampuan bertahan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Peran penting Indonesia dalam isu lingkungan juga dapat ditelaah dari

keterlibatannya dalam forum-forum dan kerjasama internasional yang bersifat multilateral dan bilateral terkait perubahan iklim. Sebagai contoh, terlibat dalam KTT Bumi/*United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), *Protokol Kyoto*, *United Nations Framework Conventions on Climate Change* (UNFCCC), *Paris Agreement*, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), *ASEAN Ministerial Meeting on the Environment* (AMME), dan forum kerjasama lainnya. Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum ini kemudian semakin memperkuat pandangan bahwa Indonesia punya peran yang cukup signifikan dalam isu-isu terkait lingkungan.

Namun, perspektif masyarakat global atau internasional terhadap Indonesia dalam konteks isu lingkungan sering kali kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya peristiwa dan kondisi domestik Indonesia yang dianggap turut berkontribusi signifikan sebagai penyebab perubahan iklim itu sendiri. Jadi, walaupun memiliki banyak sumber daya penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, hal itu tidak cukup kuat untuk menjadi alasan bagi Indonesia untuk luput dari kritik komunitas internasional dalam hal isu-isu lingkungan. Misalnya, pada tahun 2021 *Greenpeace* mengkritik pidato Presiden Joko Widodo

pada KTT COP26. NGO tersebut menilai bahwa pidato Joko Widodo tidak menunjukkan komitmen yang serius dan ambisius dalam menghadapi perubahan iklim. *Greenpeace* berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi contoh bagi negara-negara berkembang dalam mengurangi ketergantungan pada energi kotor dan mewujudkan nol deforestasi, tanpa harus bergantung pada dukungan internasional (Wicaksono, 2021).

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga pernah mengkritik negara-negara termasuk Indonesia dan mempertanyakan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon, dimana suhu global terus meningkat dan emisi karbon diperkirakan meningkat sebesar 16% hingga tahun 2030 (Detiknews, 2021). Situasi ini dianggap bertentangan dengan seruan Indonesia untuk pengurangan emisi yang cepat dan signifikan. Bahkan hanya sebagian kecil negara yang menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat target pengurangan emisi.

Sehubungan dengan itu, Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Pada tahun 2022, emisi karbon Indonesia meningkat sebesar 18,3%, yang merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Sebanyak 43,59% dari total emisi Indonesia

berasal dari deforestasi dan penggunaan lahan yang menunjukkan lemahnya perlindungan hutan (Wicaksono, 2023). Di samping itu, komunitas internasional mengkritik Indonesia karena masih bergantung pada batu bara. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat rekor baru, dimana pada awal Desember produksi batu bara mencapai 703,14 juta ton, melebihi target sebesar 694,5 juta ton (Wicaksono, 2023).

Tabel 1. 10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia (2022)

No	Negara Penghasil Emisi	Nilai per tahun
1.	Cina	11,4 miliar ton
2	Amerika Serikat	5,1 miliar ton
3.	India	2,8 miliar ton
4.	EU27	2,8 miliar ton
5.	Rusia	1,7 miliar ton
6.	Jepang	1,1 miliar ton
7.	Indonesia	700 ribu ton
8.	Iran	700 ribu ton
9.	Arab Saudi	700 ribu ton
10.	Jerman:	700 ribu ton

(Sumber: Katadata, 2022)

Sejak peristiwa kebakaran hutan pada tahun 1997 dan 1998 yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, bahkan mempengaruhi negara-negara tetangga di Asia Tenggara, komunitas internasional telah mengkritik

Indonesia yang dianggap lambat dalam menanggapi krisis kebakaran hutan. Kejadian pembakaran hutan parah yang kembali berulang pada tahun 2019 semakin meningkatkan kritik internasional terhadap Indonesia. Indonesia dianggap belum menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah atau mengendalikan kebakaran, yang sering dikaitkan dengan pembukaan lahan ilegal untuk pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit (Gellert, 1998). Selain itu, kebakaran hutan juga telah membuat hubungan Indonesia tegang dengan tetangganya, khususnya Malaysia dan Singapura, yang telah terkena dampak langsung oleh asap. Negara-negara ini telah menyerukan Indonesia untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dan tindakan untuk mengurangi kebakaran, yang menyebabkan ketegangan diplomatik (detikcom, 2023).

Menurut data statistik yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada periode Januari hingga Agustus 2023, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia, yang meliputi area seluas 267.935,59 hektar, mengalami peningkatan melampaui total luas yang terkena dampak kebakaran hutan selama keseluruhan tahun 2022, meskipun kebakaran hutan cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2019-2021.

Pengamatan ini menunjukkan bahwa intensitas kebakaran tahun 2023 jauh lebih besar daripada tahun 2022, baik dari luas wilayah karhutla maupun jumlah karhutla yang mencapai 487 yang tersebar di 5 provinsi terbanyak (Aceh 68 kejadian, Kepulauan Bangka Belitung 48 kejadian, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 43 kejadian dan Jawa Tengah 41 kejadian). Dalam jangka waktu Januari hingga Agustus 2023, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menghasilkan sekitar 32,9 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) yang secara signifikan lebih tinggi dari emisi yang tercatat pada tahun 2022, yang hanya berjumlah 23,5 juta ton CO₂e (Ahdiat, 2023).

Tabel 2. Luas Area Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (2019-Agustus 2023)

Tahun	Luas Area (hektar)
2019	1.649.258
2020	296.942
2021	358.867
2022	204.894
2023	267.935

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)

Indonesia juga sering menjadi sorotan atas berkurangnya luas area Mangrove.. Saat ini terjadi penurunan luasan hutan Mangrove di seluruh dunia karena berbagai aktivitas manusia, dan PBB mengklaim bahwa Indonesia menduduki

posisi pertama sebagai negara yang paling banyak kehilangan area Mangrove yang cukup luas (Mcowen *et al.*, 2023). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2010 sampai 2020 menyebutkan, Indonesia telah kehilangan luas tutupan mangrove hampir seluas 200 ribu hektare. Kehilangan tutupan mangrove tertinggi terjadi pada 2016, yaitu sebesar 60 ribu hektare (Republika, 2020). Dalam sumber yang berbeda dijelaskan bahwa dalam 30 tahun, Indonesia kehilangan 900 ribu hektare mangrove dari semula 4,2 juta hektare menjadi hanya 3,3 juta hektare (Tempo, 2020). Pengurangan luasan area Mangrove kemudian berkontribusi pada rusaknya lingkungan, dan percepatan perubahan iklim.

Persoalan lainnya terkait dengan angka deforestasi di Indonesia yang masih terbilang tinggi. Indonesia merupakan yang terbesar keempat di dunia dalam hal laju deforestasi akibat penebangan hutan untuk industri, pertambangan, dan perkebunan (Alexander, 2024). Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 104.032,5 hektar area lahan yang terkena deforestasi, 73.130,1 hektar di antaranya adalah kawasan hutan, dan 30.902,4 hektar area penggunaan lain atau bukan kawasan hutan (Badan Pusat Statistik, 2024). Persoalan deforestasi menjadi perhatian komunitas internasional

karena menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies. Selain itu, pohon yang ditebang melepaskan karbon dioksida yang tersimpan, berkontribusi pada perubahan iklim global, dan masih banyak lagi dampak buruk dari deforestasi. Salah satu contoh kritik internasional terhadap deforestasi di Indonesia adalah diberlakukannya UU anti deforestasi Uni Eropa bagi Indonesia (Dewi A and Agarta, 2023).

Tabel 3. Angka Deforestasi Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2020-2022 (Ha/Th)

Tahun	Kawasan Hutan	Bukan Kawasan Hutan	Total Deforestasi
2022	73.130,1	30.902,4	104.032,5
2021	83.399,3	37.306,5	120.705,8
2020	66.995,7	48.464,1	115.459,8

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Secara umum, pandangan global terhadap Indonesia terkait isu lingkungan menunjukkan beragam reaksi. Namun, banyak negara, organisasi internasional, dan komunitas global yang beranggapan bahwa Indonesia berperan dalam mempercepat perubahan iklim akibat berbagai peristiwa dan kondisi di dalam negeri. Banyak pula yang meragukan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menyadari kritik-kritik ini, sehingga dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berupaya untuk mengatasi tuduhan tersebut.

Indonesia dan *World Water Forum*

Tahun 2024, Indonesia diberi kepercayaan menjadi tuan rumah perhelatan *World Water Forum* (WWF), sebuah perhelatan internasional yang di dalamnya banyak membahas isu-isu lingkungan. WWF berkembang sebagai forum penting untuk mengatasi masalah air global. Forum ini berfungsi sebagai *platform* dialog antara para pemangku kepentingan, pemerintah, LSM, dan sektor swasta, untuk menentukan solusi bersama mengatasi tantangan global terkait air. WWF dimulai pada tahun 1997 di Marrakech, Maroko sebagai tindak lanjut dari inisiatif yang pernah dibahas pada tahun 1970-an. Dalam upaya mencapai solusi terhadap isu air, WWF saat itu melibatkan serangkaian konferensi internasional dan upaya-upaya kerja sama (Gleick and Lane, 2005). Pertemuan berikutnya yang diadakan di Den Haag (2000) dan Kyoto (2003) secara signifikan meningkatkan pengaruh WWF dalam perumusan kebijakan air internasional, yang memuncak pada pembentukan berbagai resolusi dan rencana aksi strategis yang didedikasikan untuk promosi pengelolaan air berkelanjutan (Salman, 2003). WWF dilaksanakan setiap tiga tahun, dengan negara tuan rumah yang berbeda dalam setiap perhelatannya. Hingga tahun 2024, penyelenggaraan WWF telah berlangsung sebanyak 10 kali. Adapun negara-negara yang pernah menjadi tuan

rumah WWF di antaranya adalah Maroko, Belanda, Jepang, Meksiko, Turki, Prancis, Korea Selatan, Brasil, Senegal, dan Indonesia (CNN Indonesia, 2024).

WWF memiliki peran penting dalam memajukan tujuan Dewan Air Dunia dan komunitas air global dengan mengatasi isu-isu air. Untuk mencapai hal tersebut, forum ini sengaja dirancang untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut: Pertama, memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam inisiatif terkait air, sehingga memungkinkan semua pihak untuk secara kolaboratif mengembangkan visi yang terpadu. Kedua, membentuk forum bagi semua pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, terlibat dalam pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan memulai langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan layanan air. Ketiga, mempromosikan keterlibatan pembuat kebijakan dan pembuat keputusan dalam dialog untuk menetapkan komitmen untuk kemajuan pengelolaan sumber daya air dan pemberian layanan. Keempat, meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu terkait air dalam masyarakat yang lebih luas, terutama melalui pemanfaatan saluran media. Kelima, ini mendorong konsep dan ide yang inovatif untuk mencapai solusi untuk pengelolaan air

(The 10th World Water Forum Secretariat, 2024).

Pelaksanaan WWF ke-10 diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024. Sebagai tuan rumah, Indonesia menempati posisi yang sangat penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh platform internasional ini. Terlebih lagi Indonesia sendiri turut memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan air pada 260 juta populasi dan berbagai aktivitas industrinya (The 10th World Water Forum Secretariat, 2024). Maka, saat Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah WWF, pemerintah mulai mengevaluasi secara komprehensif berbagai strategi untuk memastikan keberhasilan kegiatan tersebut, mulai dari mempersiapkan tempat dan akomodasi yang sesuai standar internasional ramah lingkungan. Pemerintah juga merencanakan untuk membangun kerangka kerja kolaboratif yang bukan hanya melibatkan pemerintah saja, tetapi juga sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, termasuk pemuda kaum pelajar. Di samping itu, Indonesia secara aktif memaksimalkan berbagai inisiatif dan inovasi inovatif dalam bidang pengelolaan air dan konservasi. Misalnya, penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi air di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan,

pertambangan, industri, dan pengelolaan lembah sungai (Ali, 2024).

WWF ke-10 di Indonesia mengusung tema *Water for Shared Prosperity*, dengan beberapa sub tema yaitu: *Water Security and Prosperity*; *Water for Humans and Nature*; *Disaster Risk Reduction and Management*; *Governance, Cooperation and Hydro-diplomacy*; *Sustainable Water Finance*; dan *Knowledge and Innovation*. Tema dan sub tema tersebut merefleksikan bahwa air adalah sumber daya vital yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air yang cukup, berkualitas baik, dan tepat waktu merupakan aspek krusial yang mempengaruhi kualitas hidup. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan manajemen yang tidak tepat dapat mengancam ketersediaan air. Untuk mencapai kemakmuran bersama, perlu ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengelolaan air. Oleh karena itu, WWF ke-10 menjadi platform untuk membahas dan mencari solusi terkait masalah air guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (The 10th World Water Forum Secretariat, 2024b).

WWF ke-10 berhasil menarik 64 ribu peserta, jauh lebih banyak dibandingkan dengan forum sebelumnya (CNBC

Indonesia, 2024). Forum ini menghasilkan beberapa capaian penting, termasuk Deklarasi Menteri dan para Kepala Delegasi yang menekankan pentingnya air untuk kesejahteraan bersama dan mengakui berbagai proses internasional terkait air dan pembangunan berkelanjutan. Mereka menegaskan hak asasi manusia atas air bersih dan sanitasi, serta pentingnya pengelolaan air yang terintegrasi untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Mereka juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta akses yang adil terhadap layanan air dan sanitasi, terutama dalam keadaan darurat. Selain itu, inovasi dalam pembiayaan dan kepemimpinan politik yang kuat dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait air. WWF berkomitmen untuk terus berkontribusi pada agenda global terkait air (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024).

Selain itu, Indonesia berhasil menyusun 113 proyek strategis sumber daya air yang nilainya mencapai 150 triliun, yang disepakati dalam WWF. Proyek ini akan dilakukan melalui pembiayaan bersama negara-negara yang terlibat dalam WWF. Proyek yang dimaksud tersebut menyangkut penyediaan air bagi masyarakat dan pengolahan air limbah domestik (Hasan,

2024). Forum ini juga merumuskan deklarasi mengenai pembentukan Center of Excellence yang bertujuan mengatasi krisis air, serta mengusulkan pembentukan Hari Danau Sedunia dan inisiatif untuk meningkatkan penyediaan air bersih di Indonesia. Para pemimpin Forum menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam melestarikan keberlanjutan sumber daya air dan mengelola air secara efektif untuk keberlanjutan dan pembangunan jangka panjang (CNBC Indonesia, 2024).

Konservasi Mangrove Sebagai Sarana Diplomasi publik Indonesia

Salah satu agenda dalam WWF ke-10 adalah kunjungan para pemimpin delegasi WWF ke Area Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Tahura Ngurah Rai) di Denpasar, Bali pada 20 Mei 2024. Dalam momentum tersebut presiden republik Indonesia, Joko Widodo menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam konservasi mangrove di kawasan tersebut. Tahura Ngurah Rai merupakan Kawasan Hutan Prapat Banoa, yang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) berdasarkan SK. Menhut No. 544/Kpts-II/1993 tanggal 25 September 1993 (Gorda and Saputra, 2020). Kawasan hijau tersebut memiliki area seluas 1.373,5 hektar, yang di dalamnya terdapat lebih dari 25 spesies Mangrove, termasuk 17 spesies

Mangrove sejati seperti *Avicennia*, *Rhizophora*, dan *Sonneratia*. Daerah ini sering berfungsi sebagai tempat untuk ekowisata, kunjungan pendidikan, dan upaya penelitian (The 10th World Water Forum Secretariat, 2024a).

Kawasan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai berfungsi sebagai model keberhasilan konservasi mangrove yang efektif yang juga mengedepankan diversifikasi usaha. Alih usaha dari budidaya tambak ke berbagai kegiatan lain yang memanfaatkan ekosistem mangrove, misalnya adalah budidaya ikan tangkap, pengolahan produk non-kayu dari mangrove, dan pengembangan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa hutan Mangrove tidak hanya dilestarikan tetapi juga dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal. Kawasan ini juga menerapkan prinsip Tri Hita Karana dari ajaran Bali, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Selain itu, Tahura dilengkapi dengan area panel surya yang berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik di berbagai lokasi Konservasi Mangrove (Kemlu RI, 2024). Wilayah ini merupakan bukti pencapaian dan dedikasi ekonomi hijau Indonesia, yang memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap inisiatif global yang bertujuan untuk

mengurangi tantangan lingkungan. Pada tahun 2022, kawasan Konservasi Mangrove di Bali mendapatkan 5.000 bibit Mangrove dengan tujuan meningkatkan upaya konservasi berkelanjutan, sehingga mempercepat proses rehabilitasi Mangrove (Muliantari, 2022).

Dalam kunjungan delegasi WWF ke kawasan Konservasi Mangrove, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya konservasi hutan Mangrove dalam penanganan perubahan iklim. Joko Widodo juga menjelaskan bahwasanya Konservasi Mangrove di Bali merupakan perlindungan bagi keanekaragaman hayati dan pusat pendidikan ekowisata. Ia menunjukkan area penanaman Mangrove di sepanjang muara yang dilengkapi dengan teknologi tenaga surya sebagai sumber energi untuk berbagai lokasi Konservasi Mangrove sebagai bentuk integrasi antara teknologi dan konservasi lingkungan. (antaranews.com, 2024). Joko Widodo juga memperlihatkan fasilitas pembibitan Mangrove yang telah dikembangkan dengan teknologi modern dengan energi terbarukan, yang mencerminkan upaya Indonesia dalam keberlanjutan lingkungan dan pelestarian alam sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana. Fasilitas ini diakui sebagai satu-satunya pembibitan Mangrove modern di Indonesia. Selain itu, Joko Widodo secara simbolis menyerahkan bibit Mangrove kepada anak-

anak, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam upaya konservasi lingkungan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024).

Sama seperti hutan hujan tropis, Mangrove turut memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim global karena karakteristik dan fungsi ekologisnya yang baik. Mangrove dikenal sebagai ekosistem “karbon biru” karena sifatnya yang dapat menyimpan sejumlah besar karbon dalam biomassa dan sedimen. Mangrove bahkan dapat menyerap karbon tiga hingga empat kali lebih banyak daripada hutan darat (Fitria and Dwiyanoto, 2021). Hal ini menjadikannya penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebuah studi menunjukkan bahwa ekosistem Mangrove menyimpan rata-rata 1.083 ± 378 mgC per hektar, dan mampu menyerap CO₂ melalui fotosintesis (Melati, 2021). Hal ini akan mengurangi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Selain itu, Mangrove melindungi pantai dari erosi dan badai, serta mendukung beragam spesies yang menjaga stabilitas ekologis. Mangrove juga dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan lebih tahan terhadap perubahan iklim.

Penulis berargumen bahwa ada empat pesan penting dan tujuan yang ingin dikomunikasikan Indonesia. Pertama, inisiatif Joko Widodo mengajak para

delegasi WWF mengunjungi kawasan Konservasi Mangrove merupakan langkah komunikasi dari pemerintah yang bertujuan menyebarkan ide dan informasi mengenai ancaman perubahan iklim yang semakin mendesak. Dalam konteks ini, Indonesia bermaksud untuk menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya melakukan aksi nyata untuk melawan perubahan iklim, sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia dalam mengembangkan Mangrove, serta mempraktikkan inovasi-inovasi modern yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan advokasi Joko Widodo dalam beberapa forum internasional lainnya yang selalu menekankan aksi nyata bersama dalam melawan perubahan iklim. Oleh karena itu, Inisiatif Joko Widodo ini menekankan pentingnya komitmen komunitas internasional dalam menghadapi tantangan lingkungan, dan keberhasilan Konservasi Mangrove menjadi bukti nyata komitmen Indonesia terhadap upaya global melawan perubahan iklim. Capaian ini kemudian ditunjukkan kepada komunitas internasional untuk membangun kepercayaan global terhadap Indonesia.

Kedua, diplomasi publik Indonesia melalui promosi konservasi mangrove merupakan upaya untuk mempengaruhi opini publik dan elite negara lain untuk menciptakan keselarasan dalam kebijakan

luar negeri. Perubahan iklim global adalah ancaman nyata yang menjadi tantangan bersama, sehingga memerlukan upaya kolektif dari semua negara untuk menghadapinya. Untuk itu, Indonesia berusaha mengajak komunitas internasional untuk menyelaraskan kebijakan mereka dalam mencari solusi dan berpartisipasi dalam upaya melawan perubahan iklim. Singkatnya, Inisiatif ini berusaha menciptakan opini publik yang memungkinkan para delegasi WWF selaku pemimpin atau pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan yang mendukung advokasi Indonesia dan Global dalam mengatasi masalah lingkungan.

Ketiga, pemerintah Indonesia berusaha mempromosikan saling pengertian di antara komunitas global, khususnya delegasi WWF, bahwa meskipun Indonesia sering dianggap berkontribusi pada percepatan fenomena perubahan iklim—terutama melalui peristiwa kebakaran hutan dan deforestasi yang tinggi—penting untuk diingat bahwa negara ini telah mencapai kemajuan signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Ini terlihat dari komitmen Indonesia untuk mengembangkan dan menjaga konservasi ekosistem Mangrove serta mengadopsi inovasi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Persepsi inilah yang ingin dibangun oleh pemerintah Indonesia

dalam Diplomasi publiknya di acara WWF 2024 tersebut.

Selama ini Indonesia berkomitmen kuat untuk mengadvokasi isu-isu lingkungan, terutama dalam mendorong kolaborasi komunitas internasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Agar dapat mempengaruhi persepsi publik, dan meyakinkan komunitas internasional, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat atau *soft power* yang signifikan untuk mempengaruhi persepsi global. Oleh karena itu, Indonesia berusaha membangun citra positif yang menarik dengan menunjukkan kepada publik bukti-bukti keberhasilannya dalam bertindak melawan perubahan iklim, salah satunya melalui keberhasilan konservasi mangrove. Dalam konteks ini Indonesia menggunakan konservasi mangrove sebagai alat untuk melakukan diplomasi publik, berusaha menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan, sambil membangun hubungan dan kerjasama internasional. Konservasi mangrove dalam hal ini tidak hanya dianggap sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dan berkontribusi dalam diskusi global mengenai lingkungan. Dengan terbangunnya persepsi positif global terhadap Indonesia, maka Indonesia akan lebih mampu mengadvokasi isu-isu lingkungan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Konservasi Mangrove memainkan peran penting dalam Diplomasi publik Indonesia di *World Water Forum* (WWF) 2024. Dengan menggunakan Konservasi Mangrove sebagai sarana diplomasi, Indonesia berusaha membangun citra positif dan meningkatkan *soft power* dan posisi tawarnya dalam diskusi global mengenai isu lingkungan. Pemerintah juga ingin menekankan pentingnya tindakan konkret untuk mengatasi perubahan iklim serta menyelaraskan kebijakan untuk menghadapi tantangan lingkungan bersama. Selain itu, penulis melihat bahwa Joko Widodo berusaha menanggapi tuduhan internasional yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara penyebab utama perubahan iklim. Ia ingin memperlihatkan potensi Mangrove yang dimiliki Indonesia dan secara tidak langsung menunjukkan kontribusi besar negara ini dalam upaya menangani perubahan iklim.

Penulis mengapresiasi upaya Indonesia dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan, termasuk konsistensi Indonesia dalam menyuarakan pentingnya partisipasi semua negara dalam mewujudkan upaya global mengatasi tantangan lingkungan. Penulis juga mengapresiasi keaktifan Indonesia dalam berbagai forum

internasional mengenai isu-isu lingkungan, termasuk keberanian dan kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan forum-forum internasional mengenai isu lingkungan seperti WWF. Namun sejauh ini, penulis menilai bahwa komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan lingkungan harus didukung dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas. Selain itu, koordinasi yang baik antar para pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat sipil mengenai upaya bersama melawan tantangan lingkungan, perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Jika hal ini dapat dicapai, maka posisi tawar Indonesia untuk mengadvokasi isu-isu lingkungan akan semakin kuat.

REFERENSI

- Ahdiat, A. (2023) *Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 267 Ribu Hektare sampai Agustus 2023*, *Katadata.co.id*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e46ac45446601ef/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-267-ribu-hektare-sampai-agustus-2023> (Accessed: 3 October 2024).
- Alexander, H.B. (2024) *Laju Deforestasi di Indonesia Terbesar Keempat di Dunia*, *KOMPAS.com*. Available at: <https://lestari.kompas.com/read/2024>

- /01/19/150000086/laju-deforestasi-di-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia (Accessed: 3 October 2024).
- Ali, F. (2024) *Menjadi Tuan Rumah World Water Forum 2024: Menuju Aksi Konkret*, *detiknews*. Available at: <https://news.detik.com/kolom/d-7300539/menjadi-tuan-rumah-world-water-forum-2024-menuju-aksi-konkret> (Accessed: 2 October 2024).
- Annur, C.M. (2022) *Potensi Ekonomi Karbon Indonesia Capai Rp8.000 Triliun, Ini Rinciannya*, *databoks.katadata.co.id*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/7f1cfbce708943d/potensi-ekonomi-karbon-indonesia-capai-rp8000-triliun-ini-rinciannya> (Accessed: 3 October 2024).
- Antara News (2024) *Presiden Jokowi ajak delegasi World Water Forum tinjau pembibitan bakau di Bali*, *Antara News*. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/4113225/presiden-jokowi-ajak-delegasi-world-water-forum-tinjau-pembibitan-bakau-di-bali> (Accessed: 2 October 2024).
- Badan Pusat Statistik (2024) 'Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 (Ha/Th)'. Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022--ha-th-.html>.
- CNBC Indonesia (2024) *Disebut Sebagai Pelaksanaan Terbaik, Ini Serba-Serbi World Water Forum*, *CNBC Indonesia*. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240526131203-4-541188/disebut-sebagai-pelaksanaan-terbaik-ini-serba-serbi-world-water-forum> (Accessed: 3 October 2024).
- CNN Indonesia (2024) *Mengenal World Water Forum 2024, Segera Digelar di Bali*, *CNN*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240517085153-199-1098755/mengenal-world-water-forum-2024-segera-digelar-di-bali> (Accessed: 2 October 2024).
- Detik (2023) *Malaysia Keluhkan Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan RI*, *detiknews*. Available at: <https://news.detik.com/internasional/d-6958231/malaysia-keluhkan-kabut-asap-akibat-kebakaran-hutan-ri-menteri-lhk-bantah> (Accessed: 3 October 2024).

- October 2024).
- Detiknews (2021) *PBB Kritik Rencana Ratusan Negara Soal Perubahan Iklim, Termasuk Indonesia*, *news.detik.com*. Available at: <https://news.detik.com/bbc-world/d-5729822/pbb-kritik-rencana-ratusan-negara-soal-perubahan-iklim-termasuk-indonesia> (Accessed: 3 October 2024).
- Dewi A, R. and Agarta, V. (2023) *4 Dampak UU Anti-Deforestasi Uni Eropa bagi Indonesia, dari Sawit hingga Kopi*, *Tempo*. Available at: <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482214/4-dampak-uu-anti-deforestasi-uni-eropa-bagi-indonesia-dari-sawit-hingga-kopi> (Accessed: 3 October 2024).
- Dewi, S. (2024) *Peran Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, *sdgs.telkomuniversity.ac.id*. Available at: <https://sdgs.telkomuniversity.ac.id/peran-hutan-dalam-mitigasi-perubahan-iklim/#> (Accessed: 3 October 2024).
- Fitria, A. and Dwiyanto, G. (2021) 'Ekosistem Mangrove dan Mitigasi Pemanasan Global', *Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains*, 2(1). Available at: <http://journals.ecotas.org/index.php/ems>.
- Gellert, P.K. (1998) 'A Brief History and Analysis of Indonesia's Forest Fire Crisis', *Cornell University Press*, 65, pp. 64–85. Available at: <https://doi.org/10.2307/3351404>.
- Gleick, P.H. and Lane, J. (2005) 'Large International Water Meetings: Time for a Reappraisal: A Water Forum Contribution', *Water International*, 30(3), pp. 410–414. Available at: <https://doi.org/10.1080/02508060508691883>.
- Gorda, A.A.Ngr.E.S. and Saputra, I.G.N.W.H. (2020) 'Pengembangan Community Based Mangrove Management Untuk Mendukung Pelestarian Dan Peningkatan Nilai Ekonomi Kawasan Mangrove Sebagai Ekowisata', *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), pp. 1–8.
- Hasan, A. (2024) *WWF ke-10 Hasilkan 113 Proyek Bernilai Rp150 Triliun*, *goodnewsfromindonesia.id*. Available at: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/05/27/wwf-ke-10-hasilkan-113-proyek-bernilai-rp150-triliun>

- (Accessed: 3 October 2024).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) *Miliki 23% Ekosistem Mangrove Dunia, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Mangrove 2017*, ppid.menlhk.go.id. Available at: https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2024) *Ministerial Declaration On Water For Shared Prosperity The 10th World Water Forum*, kemlu.go.id. Available at: https://kemlu.go.id/portal/id/read/5934/halaman_list_lainnya/ministerial-declaration-on-water-for-shared-prosperity-the-10th-world-water-forum (Accessed: 2 October 2024).
- Kemlu RI (2024) *Indonesia Tunjukkan Konservasi Mangrove Pada Delegasi World Water Forum 2024*, kemlu.go.id. Available at: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5938/berita/indonesia-tunjukkan-konservasi-mangrove-pada-delegasi-world-water-forum-2024> (Accessed: 4 October 2024).
- Mcowen, C. *et al.* (2023) 'Decades of mangrove forest change: what does it mean for nature, people and the climate?' United Nations Environment Programme.
- Melati, D.N. (2021) 'Angrove Ecosystem And Climate Change Mitigation: A Literature Review', *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 16(1), pp. 1–8.
- Melissen, J. (2005) *The new public diplomacy: soft power in international relations*. Basingstoke: Palgrave Macmillan (Studies in diplomacy and international relations).
- Mor, B.D. (2007) 'The rhetoric of public diplomacy and propaganda wars: A view from self-presentation theory', *European Journal of Political Research*, 46(5), pp. 661–683. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2007.00707.x>.
- Muliantari, N.P.P. (2022) *Tahura Ngurah Rai Bali tambah 5.000 mangrove untuk konservasi*, *Antara News*. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/3091453/tahura-ngurah-rai-bali-tambah-5000-mangrove-untuk-konservasi> (Accessed: 4 October 2024).
- Nye, Jr. (2005) *Soft Power: The Means to Success in World Politics*.

- PublicAffairs Books. 691726.
- Nye, J.S. (1990a) *Bound to lead: the changing nature of American power*. New York: Basic Books.
- Nye, J.S. (1990b) 'Soft Power', *Foreign Policy*, (80), p. 153. Available at: <https://doi.org/10.2307/1148580>.
- Nye, J.S. (2008) 'Public Diplomacy and Soft Power', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), pp. 94–109.
- Nye, J.S. (2021) 'Soft power: the evolution of a concept', *Journal of Political Power*, 14(1), pp. 196–208. Available at: <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1879572>.
- Puspitasari, A., Rangga, M. and Wicaksono, T.P. (2024) 'INDONESIA'S CULTURAL DIPLOMACY IN INTRODUCING SUBAK AND SPICE ROUTES AT WORLD WATER FORUM 2024'. LPPM-UNILA Institutional Repository.
- Salman, S.M.A. (2003) 'From Marrakech through The Hague to Kyoto: Has the Global Debate on Water Reached a Dead End?: Part One', *Water International*, 28(4), pp. 491–500. Available at: <https://doi.org/10.1080/02508060308>
- Saputra, H.D. (2024) *World Water Forum 2024 di Bali Hasilkan Deklarasi Menteri Pertama Kali, detikbali*. Available at: <https://www.detik.com/bali/berita/d-7351489/world-water-forum-2024-di-bali-hasilkan-deklarasi-menteri-pertama-kali> (Accessed: 30 September 2024).
- Satria, Ardhi. (2023) 'Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Rumitnya Masalah Hutan Indonesia', *Universitas Gadjah Mada*, 6 October. Available at: <https://ugm.ac.id/id/berita/kementeria-n-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ungkap-rumitnya-masalah-hutan-indonesia/> (Accessed: 3 October 2024).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2024) *Presiden Jokowi Tunjukan Konservasi Mangrove pada Kepala Negara dan Delegasi KTT WWF*, *setkab.go.id*. Available at: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tunjukan-konservasi-mangrove-pada-kepala-negara-dan-delegasi-ktt-wwf/> (Accessed: 30 September 2024).
- Snow, N. (2004) 'Inventing Public

- Diplomacy: The Story of the U.S. Information Agency', *History: Reviews of New Books*, 33(1), pp. 10–11. Available at: <https://doi.org/10.1080/03612759.2004.10526374>.
- The 10th World Water Forum Secretariat (2024a) 'THE 10TH WORLD WATER FORUM: Water For Shared Prosperity PROGRAM BOOK'. The 10th World Water Forum Secretariat. Available at: Worldwaterforum.org.
- The 10th World Water Forum Secretariat (2024b) *Water for Shared Prosperity*, worldwaterforum.org. Available at: <http://worldwaterforum.org/water-forum> (Accessed: 2 October 2024).
- Varady, R.G., Meehan, K. and McGovern, E. (2009) 'Charting the emergence of "global water initiatives" in world water governance', *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 34(3), pp. 150–155. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.06.004>.
- Wau, M.V.C., Luerdi and Nugrahayuningtyas, N. (2024) 'Bali Street Carnival dan Melasti Water Carnival Sebagai Bentuk Diplomasi Budaya Indonesia Dalam the 10th World Water Forum'. LPPM-UNILA Institutional Repository. Available at: <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/54004>.
- Wicaksono, R.A. (2021) *Gelombang Kritik PascaPidato Jokowi di COP26*, betahita.id. Available at: <https://betahita.id/news/lipsus/6733/gelombang-kritik-pascapidato-jokowi-di-cop26.html?v=1639735277> (Accessed: 3 October 2024).
- Wicaksono, R.A. (2023) *Indonesia Masuk 10 Besar Penghasil Emisi Karbon Dunia*, betahita.id. Available at: <https://betahita.id/news/detail/9605/indonesia-masuk-10-besar-penghasil-emisi-karbon-dunia.html?v=1701812357> (Accessed: 3 October 2024).
- World Water Forum Secretariat (2024) *The 10th World Water Forum Officially Concluded, Marking A New Milestone in Global Water Initiative*, worldwaterforum.org. Available at: <http://worldwaterforum.org/blog/news-3/the-10th-world-water-forum-officially-concluded-marking-a-new-milestone-in-global-water-initiative-243> (Accessed: 30 September 2024)
- Yigit, S. (2024) 'Soft Power: An Enduring Notion in Contemporary International Politics', in M. Zreik (ed.) *Advances in*

Public Policy and Administration. IGI
Global, pp. 163–178. Available at:
[https://doi.org/10.4018/979-8-3693-
2444-8.ch011](https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2444-8.ch011).